

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diperjelas dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pembangunan nasional diharapkan mampu menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat (Sudjana, 2004:148).

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial (UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dalam melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat instansi-instansi sosial (Suharto, Dalam M.J. Maspaitella dkk, 2014:158).

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Defenisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat serta peningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk memepergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalaui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan kesehatan dan bantuan sosial lainnya (Andi Fahrudin, 2012:11). Kesejahteraan Sosial merupakan sistem yang terorganisir dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu atau kelompok dalam mencapai standart hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. (Walter A. Friedlander, Dalam Whibawa dkk, 2015:29).

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) tanggal 6- 8 September 2000 yang dihadiri oleh kepala

negara dan kepala pemerintahan dari negara anggota PBB telah sepakat untuk menciptakan dunia yang lebih sejahtera, adil serta damai. Kesepakatan inilah yang menjadi awal dari pembentukan tujuan pembangunan *millennium* (*Millennium Development Goals/MDG*). Pada laporan MDG tahun 2012, pencapaian MDG telah dinilai berhasil oleh para kepala negara dan pemerintahan negara anggota PBB dalam memberikan dukungan dan perhatian dunia untuk mencapai target pembangunan millennium sebagaimana dengan tujuan-tujuan yang terdapat di dalamnya. MDG memiliki delapan tujuan pembangunan millennium, yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Indonesia sendiri menyadari arti penting dari MDG. Indonesia telah menjadikan pencapaian MDG sebagai salah acuan penting terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, komitmen Indonesia untuk mencapai target-target yang terdapat dalam MDG, sudah sesuai dengan komitmen negara ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya serta memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian di setiap negara dan menjadi tolok ukur dalam kesejahteraan. Kemiskinan menjadi penyebab utama dari sejumlah problem sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu,

penanggulangan kemiskinan menjadi puncak dari solusi program *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015 (Lubis, 2010). Sampai dengan akhir abad 20 kemiskinan masih menjadi beban dunia. Nampaknya isu kemiskinan akan terus menjadi persoalan yang tidak akan pernah hilang di dunia ini. Dunia meresponnya dengan menyepakati suatu pertemuan pada September 2000 yang diikuti oleh 189 negara dengan mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan *The Millenium Development Goals* (MDG's). Salah satu targetnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50% pada tahun 2015. Deklarasi ini memberikan indikasi bahwa kemiskinan masih menjadi masalah besar dunia dan menunjukkan bahwasannya Indonesia masih berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut.

Era MDGs yang berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya berakhir pada tahun 2015 yang kemudian selanjutnya saat ini memasuki era SDGs (*Sustainable Development Goals*), yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Seremoni ini merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen SDGs yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2015 yang juga berlokasi di New York. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" atau "Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dokumen SDGs pun dicetuskan untuk meneruskan dan

memantapkan capaian-capaian MDGs sebelumnya agar langgeng dan berlanjut seterusnya.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari global goals *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015. Secara formal, SDGs didiskusikan pertama kali pada *United Nations Conference on Sustainable Development* yang diadakan di Rio de Janeiro bulan Juni 2012. Dokumen SDGs disahkan pada KTT Pembangunan berkelanjutan PBB yang berlangsung di New York tanggal 25-27 September 2015. Dalam KTT tersebut ditetapkan bahwa SDGs akan mulai diberlakukan pasca tahun 2015 sampai tahun 2030. SDGs tidak hanya berlaku untuk negara berkembang, tapi juga untuk negara-negara maju pada akhir tahun 2015. *Sustainable Development Goals* (SDG'S) yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Post-2015, juga dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO). Penyusunan SDGs sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam SDGs. Seluruh tujuan, target dan indikator dalam dokumen SDGs juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini (Yohanna, 2015).

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015, *Millennium Development Goals* (MDGs). Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), diantaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi positif dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang mencapai 5,28 persen dan meningkat menjadi 6,12 persen pada tahun 2010 (BPS, 2011). Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang ini lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Timur. Namun, kondisi ini tidak diimbangi dengan menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang tetap tinggi dan masih berada di atas angka kemiskinan nasional dengan persentase sebesar 10,34 persen dari total penduduk pada tahun 2017 dan

mencapai 9,56 persen dari total penduduk pada tahun 2018 (Bappeda, 2018). Oleh karena itu, terdapat indikasi adanya permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan dari pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, berbagai program pemerintah perlu dikaji lebih mendalam agar realisasinya berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dibuat rumusan masalah seperti berikut:

1. Apakah Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kesehatan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jombang ?
2. Diantara Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kesehatan manakah yang paling berpengaruh terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kesehatan terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui yang mana diantara Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kesehatan yang paling berpengaruh terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan rekomendasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan faktor-faktor kependudukan.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menambah bukti empiris mengenai Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kesehatan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jombang yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bagi kalangan akademis, diharapkan akan menambah wawasan dan sebagai referensi dalam penelitian yang sejenis di masa mendatang.
4. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kesehatan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jombang.